KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **TRI SOEWANDONO**

Jabatan : **Sekretaris Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MOH. MAHFUD MD**

Jabatan : **Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2020

Pihak Kedua	**Pihak Pertama**
MOH. MAHFUD MD	**TRI SOEWANDONO**

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

Unit Organisasi : Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Polhukam
Tahun Anggaran : 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
SDM yang Kompetitif	Persentase Pegawai yang telah memenuhi persyaratan informasi jabatan	70%
Organisasi yang Fit & Purpose	Nilai RB Kemenko Polhukam	78
Layanan dukungan sekretariat dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang optimal	1. Indeks kepuasan layanan dukungan sekretariat	70
	2. % (Persentase) Laporan penyelesaian tugas teknis lainnya yang ditindaklanjuti Menko Polhukam	50%
Pengelolaan Anggaran yang Akuntabel dan Optimal	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam	WTP
	2. Nilai SAKIP Kemenko Polhukam	70
	3. Nilai Evaluasi atas RKA- K/L Kemenko Polhukam	93

Jumlah Anggaran Program:
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya: Rp. 152.000.678.000,-
(Seratus Lima Puluh Dua Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Jakarta, Januari 2020

Menko Polhukam

MOH. MAHFUD MD

Sekretaris Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

TRI SOEWANDONO

DOKUMEN MANUAL PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SESMENKO POLHUKAM

Sasaran Strategis	SDM yang Kompetitif
Indikator Kinerja 1	Persentase Pegawai yang telah memenuhi persyaratan informasi jabatan
Definisi	Perhitungan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana di Kemenko Polhukam yang sesuai dengan syarat jabatan pada Kepmenko Polhukam Nomor 74 Tahun 2017 tentang Informasi Jabatan di Kemenko Polhukam, dengan indikator penilaian berdasarkan: 1. Pangkat/golongan ruang, 2. Pendidikan, 3. Diklat, 4. Pengalaman Kerja terkait Jabatan yang diduduki
Sumber Data	Informasi jabatan Kemenko Polhukam dan Peta Jabatan Kemenko Polhukam
Cara Menghitung	1. Menentukan bobot dari masing-masing indikator penilaian: a. Pangkat/Golongan Ruang, dengan bobot penilaian 30 b. Pendidikan, dengan bobot penilaian 20 c. Diklat, dengan bobot penilaian 20 d. Pengalaman kerja terkait jabatan yang diduduki dengan bobot penilaian 20 2. Mengklasifikasian Total penilaian indikator, jika nilai < 60 = tidak memenuhi syarat 3. Mengklasifikasi total penilaian indikator, jika nilai ≥ 60 = memenuhi syarat 4. Menghitung jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan informasi jabatan
Sasaran Strategis	Organisasi yang Fit & Purpose
Indikator Kinerja 1	Nilai RB Kemenko Polhukam

Definisi	Penilaian Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB sesuai Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025. Terdapat 8 area perubahan yang menjadi penilaian dalam Reformasi Birokrasi yaitu Area Manajemen Perubahan, area penataan dan penguatan organisasi, area penataan peraturan perundang-undangan, area penataan sumber daya manusia, area penataan tata laksana, area penguatan pengawasan, area penguatan akuntabilitas kerja, dan area peningkatan kualitas pelayanan publik
Sumber Data	Indeks RB yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB sebagai tim penilai Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga
Cara Menghitung	Skor dikeluarkan oleh Tim Penilai RB dengan melihat upaya perbaikan dari 8 area perubahan RB dengan skala skor 1 - 100
Sasaran Strategis	Layanan dukungan sekretariat dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang optimal
Indikator Kinerja 1	Indeks kepuasan layanan dukungan sekretariat
Definisi	Indeks kepuasan layanan dukungan sekretariat adalah indeks yang dapat menyajikan data dan informasi tentang tingkat kepuasan layanan dukungan sekretariat yang diperoleh dari hasil pengukuran kuantitatif dan kualitatif atas pendapat stakeholder/pengguna jasa sekretariat Kemenko Polhukam.
Sumber Data	pelaksanaan survey yang dilakukan pada seluruh unit kerja dibawah koordinasi Sesmenko Polhukam
Cara Menghitung	$\Sigma = \mu$ indeks kepuasan layanan pada unit organisasi dibawah koordinasi Sesmenko Polhukam dengan skala likert 1 – 5
Indikator Kinerja 2	% (Persentase) Laporan penyelesaian tugas teknis lainnya yang ditindaklanjuti Menko Polhukam
Definisi	Laporan penyelesaian tugas teknis lainnya yang ditindaklanjuti Menko Polhukam merupakan indikator yang diukur melalui penyelesaian permasalahan tugas teknis yang ditugaskan Menko Polhukam kepada Sekretaris Kemenko untuk dapat menyusun laporan

	penyelesaian permasalahan tugas teknis lainnya dan dapat ditindaklanjuti Menko Polhukam
Sumber Data	laporan penyelesaian tugas teknis lainnya yang ditindaklanjuti Menko Polhukam
Cara Menghitung	$\Sigma =$ (jumlah laporan penyelesaian tugas teknis lainnya yang ditindaklanjuti oleh Menko Polhukam **dibagi jumlah** laporan penyelesaian tugas teknis lainnya) **dikali** 100%
Sasaran Strategis	Pengelolaan Anggaran yang Akuntabel dan Optimal
Indikator Kinerja 1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam
Definisi	Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan Kementerian/ Lembaga Pemerintah. 4 (empat) opini BPK, yaitu : WTP, WDP, adversed, dan disclaimer.
Sumber Data	laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK RI
Cara Menghitung	penilaian yang berasal dari BPK RI
Indikator Kinerja 2	Nilai SAKIP Kemenko Polhukam
Definisi	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian yang sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja instansi Pemerintah. Komponen Penilaian Evaluasi SAKIP Kemenko Polhukam yaitu: 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Internal 5. Capaian Kinerja
Sumber Data	Tim Penilai SAKIP Kemenko Polhukam (Kemenpan RB)

Cara Menghitung	Penilaian berasal dari Tim Penilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Kemenpan RB berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan kategori penilaian sebagai berikut: 1. AA (>90-100) 2. A (>80-90) 3. BB (>70-80) 4. B (>60-70) 5. CC (>50-60) 6. C (>30-50) 7. D (0-30)
Indikator Kinerja 3	Nilai Evaluasi atas RKA- K/L Kemenko Polhukam
Definisi	Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan RKA-K/L selanjutnya disebut evaluasi kinerja adalah proses untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yg telah ditetapkan ditetapkan dalam dokumen RKA-K/L.
Sumber Data	Data Dokumen RKA-K/L, Rencana Penarikan Dana, Realisasi Anggaran, Capaian Output, Capaian Outcome,dan Jumlah Revisi Anggaran.
Cara Menghitung	1. Pengukuran Aspek Implementasi 2. Pengukuran Aspek Manfaat 3. Pengukuran Aspek Konteks *Pengukuran dilakukan melalui aplikasi SMART DJA

Sekretaris Kemenko Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan,

TRI SOEWANDONO